

ANALISIS KINERJA ORGANISASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:
Dwi Eki Liansyah, Maesaroh

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693
Telepon6 (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The era of globalization is now modern and it is characterized by the presence of increasingly advanced technology. Technology was created to facilitate the public in obtaining information. Information that can be obtained by the public via mass media such as television. With openness of the press, television broadcasts are free and need to be controlled so as not to violate the rules of P3SPS. The broadcaster in Central Java has a large number and wide range. The administrative recap provided by KPID of Central Java is not in accordance with the target. This study was designed to explain in more detail the performance of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Java Province. This type of research is descriptive qualitative. Indicators that become performance appraisals include productivity, service quality, responsiveness, and accountability. The results of this research can be concluded that the performance of Central Java KPID in providing services to the community needs to be improved again. KPID Central Java has problems in the lack of supervision to the broadcaster, the realization of programs and activities also not in accordance with the time set in the regulation, broadcast permit requirements are complicated for the applicant, as well as regulations that have not updated its contents. The factors that inhibit the performance of Central Java KPID covering human resources and limited infrastructure facilities. Suggestions from researchers on the performance of KPID Central Java is the improvement of supervisory function by involving other public organizations, the addition of human resources and infrastructure facilities as needed, and the existing regulations need to be updated again its contents.

Keywords: Organizational Performance, Productivity, Responsiveness, Responsibility, Infrastructure

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Televisi merupakan salah satu media massa yang terkenal di kalangan masyarakat. Televisi juga merupakan alat penyampaian pesan dan informasi kepada masyarakat. Siaran yang disampaikan juga beragam mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Siaran yang ada juga sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. Informasi dari media ini patut kita perhatikan. Pasalnya, televisi tak hanya memberikan informasi tetapi menyebarkan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi masyarakat tanpa kita sadari.

Di era reformasi ini terdapat perubahan-perubahan yang membuat penyiaran atau pers Indonesia semakin terbuka dan bebas. Salah satu produk dari era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin independensi pers, dalam arti tidak ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional.

Tidak cukup dengan itu, kemudian lahir UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua, semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Kebebasan penyiaran yang semakin terbuka tak hanya menjadikan siaran televisi sebagai media pengontrol kebijakan pemerintah. Siaran televisi juga menyajikan berbagai macam acara hiburan sebagai variasi siaran, sebagai langkah menarik penonton sebanyak-banyaknya. Hal ini tak terlepas dari ketatnya persaingan yang terjadi karena semakin banyak stasiun televisi yang ada.

Televisi sebagai aset publik sudah seharusnya menampilkan siaran yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, pengelolaan menjadi sangat vital terhadap media ini. Pengelolaan bukan sekedar mengelola saja tapi perlu memperhatikan aspek apa yang dikelola. Proses pengaturan, pengawasan, dan pengembangan terhadap isi penyiaran informasi yang ditampilkan itu merupakan aspek pengelolaan penyiaran. Selain itu, pengelolaan penyiaran aset publik tak lepas dari pengaruh lembaga yang menaungi bidang tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah yang disingkat dengan KPID Jateng, merupakan lembaga kontrol penyiaran yang bertugas di daerah Jawa Tengah. Untuk menilai kinerja KPID Jateng, terdapat indikator untuk mengukur kinerjanya. Pada penelitian terdahulu, kinerja organisasi KPID DIY Periode I dan II diukur dengan menggunakan *balance scorecard* yang dinilai dari capaian perspektif yang meliputi: perspektif finansial, perspektif kepuasan *stakeholder*, perspektif pembelajaran, perspektif manajemen, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Rendahnya kinerja KPID DIY Periode I dan II ternyata dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi aspek manajerial, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang kurang kuat (Darmanto, 2012).

Penelitian lainnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda, penelitian kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Studi Kasus di UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele) dilihat dari dimensi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang dikatakan belum optimal dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi, yaitu sarana prasarana rekreasi yang tersedia di UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele kurang beragam dan ada yang rusak, belum memiliki wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, belum memiliki prosedur terkait standar usaha taman rekreasi, serta pencapaian kinerja organisasi yang belum optimal. Kendala lainnya, yaitu anggaran untuk perawatan dan operasional UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele yang terbatas dan kurangnya jumlah sumber daya manusia (Kurniati, 2015).

Selanjutnya, penelitian terdahulu mengenai kinerja organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang yang dikatakan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang terdapat pada dimensi masukan (*input*), kualitas layanan, efektivitas, dan responsivitas. Dari keempat dimensi tersebut masih ditemukan dimensi yang belum berjalan optimal karena ada permasalahan yang meliputi keterbatasan jumlah sumber daya

manusia, masih belum optimalnya upaya Dinas Kebakaran Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masih belum tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan (Parameswari, 2015)

Penelitian terdahulu lainnya mengenai kinerja organisasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Semarang pada pelayanan bantuan dan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dilihat dari lima dimensi kinerja organisasi yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sudah optimal, hanya saja masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pekerja sosial yang mendaftarkan jumlah PMKS di wilayah Kabupaten Semarang, pencapaian SPM pemberian bantuan dan jaminan sosial pada tahun 2015 yang tidak sesuai dengan target capaiannya 80% dan capaiannya hanya sebesar 49,25%, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung program dan kegiatan, sumber daya manusia belum cukup memadai serta partisipasi masyarakat yang kurang (Rachmawati, 2016).

Selanjutnya, penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dilihat dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas masih dikatakan belum optimal. Hal tersebut terbukti dari beberapa kendala dalam melaksanakan program seperti sarana dan prasarana yang kurang, pegawai yang belum berkomitmen untuk mengerjakan tugas, bentuk pertanggungjawaban

kepada masyarakat belum terbuka dan transparan (Dewantoro, 2016).

Berdasarkan landasan dari penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa belum pernah dilakukan penelitian mengenai kinerja organisasi KPID Jateng. Untuk di provinsi lain, penelitian sudah pernah dilakukan menganalisis kinerja organisasi KPID. Atas dasar penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dilihat dari indikator produktivitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan dan akuntabilitas. Pada indikator produktivitas, KPID Jateng belum mampu merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran yang harus dicapai. Hal ini terbukti dari rekap sanksi administrasi yang diberikan KPID Jateng kepada lembaga penyiar. Berikut tabel rekap sanksi administrasi pada lembaga penyiar tahun 2013 – 2016.

Tabel 1 Rekap Sanksi Administratif pada Lembaga Penyiar Tahun 2013 – 2016

No	Jenis Sanksi Administrasi	2013	2014	2015	2016
1	Teguran Tertulis	47	29	61	32
2	Klarifikasi	44	4	0	0
3	Penghentian Sementara Mata Acara	0	0	0	0
	Jumlah (Realisasi)	93	33	61	32
	Target (Sasaran)	55	50	45	40

Sumber: Subbidang Pemantauan dan Pengawasan KPID Jateng

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa adanya fluktuasi pada empat tahun terakhir mengenai

sanksi administrasi yang diberikan kepada lembaga penyiaran. Pada tahun 2012 sanksi berjumlah 22 sanksi, namun pada tahun berikutnya terjadi kenaikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang mencapai 93 sanksi. Sementara tahun 2014 kembali turun dan kemudian naik kembali pada tahun 2015 yang mencapai 61 sanksi. Fluktuasi sanksi administrasi dikarenakan para lembaga penyiaran kurang mematuhi aturan penyiaran tersebut dan juga mengindikasikan terdapat lemahnya pengawasan yang dilakukan KPID Jateng.

Pada indikator responsibilitas, KPID Jateng belum maksimal dalam menyesuaikan tahapan waktu proses perizinan dengan regulasi. Hal ini terbukti dari Radio Konata yang mengurus perizinan pada awal 2016 baru bisa melaksanakan EDP di tahun 2017. Padahal, regulasi perizinan menyatakan bahwa untuk menunggu dilaksanakannya EDP, pemohon diminta menunggu 15 hari kerja. Tetapi, apa yang ditemukan di lapangan pemohon menunggu lebih dari 15 hari kerja yang berarti tidak sesuai dengan aturan waktu di regulasi perizinan siaran.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPID Jateng dalam mengontrol penyiaran di Jawa Tengah belum optimal. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul “**Analisis Kinerja Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah**”.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui kinerja organisasi Komisi Penyiaran

- Indonesia Daerah Jateng dalam mengelola penyiaran di Jateng
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kinerja organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng

C. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3), administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik.

Nicholas Henry dalam buku Teori Administrasi Publik (dalam Pasolong, 2007:19) menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain yaitu:

- a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Dari ruang lingkup administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas Henry menyebutkan bahwa, ruang lingkup administrasi publik berawal dari organisasi publik, yang didalamnya terdapat manajemen publik yang

mengatur segala kegiatan di dalam organisasi yang mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) ialah sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumberdaya guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Overman (dalam Keban, 2004:85), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Dari berbagai pengertian tersebut, maka manajemen publik merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Untuk mengetahui hasil dari pencapaian tujuan organisasi tersebut maka bisa dilihat dari hasil kerja atau kinerja.

3. Kinerja

Menurut Mahsum dalam buku Budaya dan Kinerja Organisasi (dalam Sembiring, 2012:81) mendefinisikan kinerja adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*.”

Mangkunegara dalam buku Teori Administrasi Publik (dalam Pasolong, 2007:176) mengatakan bahwa “kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

Pengertian kinerja yang telah dikemukakan oleh para tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan penilaian kerja organisasi yang bisa dilihat dari aspek hasil kerja maupun dari proses kerja.

4. Kinerja Organisasi

Ada beberapa indikator untuk mengatur kinerja birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto (2008:50-51), sebagai berikut:

1. Produktivitas; konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
2. Kualitas Layanan; isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja suatu organisasi pelayanan publik. Cara mengukur kualitas layanan dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
3. Responsivitas; kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dari prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas; menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan

organisasi publik ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

5. Akuntabilitas; menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

Kumorotomo, 1996 (dalam Sudarmanto, 2009:16) merumuskan empat indikator penilaian terhadap kinerja organisasi, yaitu:

1. Efisiensi: menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.
2. Efektivitas: menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan: menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik.
4. Daya tanggap: daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penggunaan indikator kinerja memiliki karakteristik yang berbeda antara pendapat satu dengan yang lain. Penggunaan indikator ini sangat penting dalam menilai pencapaian suatu organisasi. Pencapaian organisasi menginginkan

keberhasilan terhadap program atau kegiatan yang dijalankan. Tetapi, dalam mewujudkan keberhasilan itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Menurut Soesilo (dalam Tangkilisan, 2005:108) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- b. Kebijakan pengelola, berupa visi dan misi organisasi.
- c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelola database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Selanjutnya, menurut Wibowo (2007:67) terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai kinerja yang baik, yaitu: pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai; manajemen strategis; manajemen sumber daya manusia; pengembangan organisasi; konteks organisasi; desain kerja; fungsionalisasi; budaya; dan kerja sama

Setiap organisasi mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada hakikatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda.

D. Operasionalisasi Konsep

Analisis indikator kinerja KPID

Jateng meliputi:

1. Produktivitas, yaitu pencapaian hasil atau *output* dari KPID Jateng atas *input* atau sumber daya dan sarana prasarana yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Realisasi program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran.
 - b. Hambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan.
 - c. Upaya dalam meningkatkan produktivitas kerja.
2. Kualitas layanan, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KPID Jateng. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Kesederhanaan pelayanan.
 - b. Kejelasan pelayanan.
 - c. Sikap petugas pelayanan.
 - d. Kemudahan akses pelayanan.
 - e. Kenyamanan pelayanan.
 - f. Cara pemberian layanan.
 - g. Kepuasan masyarakat terhadap layanan.
3. Responsivitas, yaitu keselarasan antara program KPID Jateng dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Kemampuan KPID Jateng memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Hambatan dalam merespon

- aduan masyarakat.
- c. Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan KPID Jateng.
4. **Responsibilitas**, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan KPID Jateng dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang ada atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Kesesuaian program KPID Jateng dengan regulasi.
 - b. Kesesuaian waktu kegiatan dengan regulasi.
 - c. Hambatan dalam menyesuaikan kegiatan dengan regulasi.
 5. **Akuntabilitas**, yaitu bentuk pertanggungjawaban KPID Jateng terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Bentuk pertanggungjawaban.
 - b. Transparansi kinerja.

Selain indikator kinerja di atas, ada dua faktor yang dinilai menghambat kinerja KPID Jateng yang meliputi:

1. **Sumber daya manusia**, berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai penggerak suatu organisasi dalam mencapai visi misinya, sumber daya manusia harus dapat dikelola dengan baik, hal ini dilihat dari:
 - a. Kualitas sumber daya manusia dalam menyelesaikan pekerjaan.
 - b. Ketersediaan pegawai dalam menjalankan program dan kegiatan.
2. **Sarana dan prasarana**, merupakan suatu dukungan yang berhubungan dengan teknologi

atau yang lainnya bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi sehingga dapat membantu setiap pelaksanaan kegiatan organisasi. Hal ini dilihat dari:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan sarana dan prasarana untuk menjalankan program dan kegiatan.

E. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait fenomena sosial yang diteliti yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai KPID Jateng dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai KPID Jateng dan masyarakat pengguna layanan.

Data yang telah diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan cara dirangkum lalu disajikan dalam bentuk kata-kata, tabel, gambar dan sebagainya. Kemudian, data itu di verifikasi dengan dibuat kesimpulan yang menyatakan bahwa data tersebut dibuktikan kebenarannya. Teknik untuk menguji kualitas data itu dengan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan data

sebagaimana pembandingan data tersebut. Caranya dengan melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Organisasi KPID Provinsi Jawa Tengah

A. Produktivitas

Aspek produktivitas dalam menilai kinerja menjadi penting untuk dilihat, karena dari aspek ini kinerja organisasi bisa mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan organisasi (Dwiyanto, 2008:50-51). Selain itu, produktivitas juga melihat capaian target organisasi terhadap realisasi yang ada di lapangan. Hasil yang peneliti peroleh terdapat perbedaan antara hasil wawancara dengan data sekunder. Data sekunder disini berupa LAKIP, dan data pendukung lainnya yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara, produktivitas KPID Jateng yang dihasilkan sudah baik dalam mencapai efisiensi dan efektivitas. Namun, jika melihat LAKIP ada beberapa sasaran yang belum mencapai targetnya. Berikut sasaran-sasaran yang belum sesuai dengan target.

1. Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat yang sesuai dengan norma dan kearifan lokal

Dalam sasaran ini, terdapat indikator didalamnya yang belum tercapai yakni jumlah pelanggaran yang diberikan menurun. Pelanggaran yang diberikan tersebut ialah berupa sanksi yang meliputi teguran tertulis, klarifikasi, dan penghentian sementara mata acara. Dari target yang telah disusun dalam renstra,

terdapat target capaian yang melebihi jumlah pelanggaran yang diberikan. Pada tahun 2013, target jumlah pelanggaran mencapai 55 sanksi sementara realisasi jumlah pelanggar berada jauh pada 93 sanksi. Sementara tahun 2014 target jumlah pelanggaran mencapai 50 sanksi sementara realisasi jumlah pelanggar turun menjadi 33 sanksi. Lanjut di tahun 2015, target jumlah pelanggaran mencapai 45 sanksi sementara realisasi jumlah kembali naik menjadi 61 sanksi. Di tahun berikutnya 2016, target jumlah pelanggaran mencapai 40 sanksi sementara realisasi turun kembali menjadi 32 sanksi.

KPID Jateng memiliki kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang bekerja. Pengawasan isi siaran yang dilaksanakan oleh KPID Jateng dikatakan masih kurang karena dalam pelaksanaannya personil yang bekerja dalam memantau siaran di kantor dibebani dengan memantau empat siaran televisi sekaligus. Hal semacam ini dirasa kurang efektif dengan beban pekerjaan untuk mengawasi siaran.

2. Terwujudnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat.

Dalam sasaran ini terdapat beberapa indikator didalamnya yang belum tercapai yang meliputi kegiatan literasi media dan kegiatan dialog interaktif seputar isu-isu tentang penyiaran. Target kegiatan literasi media yang diberikan KPID Jateng kepada kalangan pelajar dan mahasiswa ialah 20 kegiatan. Sementara, realisasi yang ada di

lapangan hanya mencapai 8 kegiatan saja yang diselenggarakan KPID Jateng. Untuk kegiatan dialog interaktif seputar isu-isu penyiaran, KPID Jateng menargetkan 15 kegiatan sementara, realisasi hanya mencapai 12 kegiatan saja.

Kendala yang dihadapi pada sasaran ini ialah keterbatasan anggaran yang diberikan KPID Jateng. Anggaran yang diberikan Pemprov kepada KPID Jateng bukan anggaran yang dikhususkan melainkan dana hibah. Pemberian dana hibah ini sama halnya disejajarkan dengan dana untuk ormas-ormas. Anggaran berupa hibah juga tidak sama banyak dengan kedudukan dinas atau yang sekarang bernama badan. Dengan keterbatasan ini, KPID Jateng sulit untuk merealisasikan apa yang telah direncanakan.

B. Kualitas Layanan

Kedudukan KPID Jateng sebagai organisasi publik pasti mengarah pada tujuan untuk melayani kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud juga terkait dengan tupoksi dalam hal penyiaran. Layanan yang diberikan KPID Jateng berupa pelayanan perizinan, pelayanan pengawasan dan pemantauan siaran, pelayanan pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan peningkatan kualitas sdm penyiar. Dari sejumlah layanan yang diberikan diatas akan terlihat bagaimana kualitas yang diberikan KPID Jateng terhadap pengguna yang menerima layanan itu.

Layanan pengawasan sejauh ini sudah dapat dikatakan baik, hanya saja dalam mengawasi penyiaran belum sepenuhnya efektif karena

jumlah tenaga pemantau yang terbatas di kantor. Tenaga pemantau KPID Jateng terdapat 12 orang. Untuk satu tenaga saja, mereka melakukan pemantauan empat siaran televisi.

Dalam pengawasan, pemberian pelayanan kepada kelompok pemantau selain pembekalan dan pelatihan, mereka juga diberi alat pantau oleh KPID Jateng dan tidak semua kelompok pemantau tersebut mendapatkannya. Alat pantau tersebut hanya tersedia di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Masyarakat yang menikmati siaran televisi dan radio juga ikut mengawasi dan memantau isi siaran. Kegiatan pembekalan dan pelatihan juga diberikan oleh KPID Jateng kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya ini ialah melakukan literasi media kepada kalangan pelajar dan mahasiswa.

Masyarakat yang ingin membuka stasiun televisi dan radio di Jawa Tengah bisa melalui izin terlebih dahulu kepada KPID Jateng. Dari segi kualitas, layanan izin sudah dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaannya. Kesederhanaan pelayanan juga dirasakan oleh pemohon yang mengajukan siaran. Prosedur pelayanan yang sekarang sudah lebih mudah karena regulasi baru itu. Alur proses perizinan juga sudah mudah dengan diatur pada Perkominfo No. 18 Tahun 2016.

KPID Jateng hadir memberikan pelayanan kepada penyiar radio dengan pelatihan peningkatan kualitas SDM. Di dalam pelatihan, KPID Jateng juga memberikan sertifikasi kepada penyiar radio jika mereka berhasil

lulus dalam ujian regulasi penyiaran, praktik penyiaran, dan lulus menulis *script*.

C. Responsivitas

Dalam pengawasan, KPID Jateng menerima aduan dari masyarakat mengenai isi siaran yang diduga melanggar. Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPID Jateng bisa melalui telepon, sms dan bisa melalui media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. KPID Jateng memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduannya, yakni dengan menyediakan form aduan dan pengawasan pada laman website resmi.

Hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kurangnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tugas KPID Jateng secara menyeluruh. Masyarakat masih mengira bahwa KPID Jateng juga ikut mengawasi siaran yang ada di media sosial.

Masyarakat menilai bahwa pada pelayanan pengawasan, KPID Jateng lebih sering memberikan teguran pada lagu yang diputar sementara isi konten jarang sekali ditegur. Sementara pada pelayanan perizinan, masyarakat mengeluhkan dengan persyaratan perizinan mengenai studi kelayakan yang rumit karena harus disusun seperti layaknya skripsi.

D. Responsibilitas

Program yang dijalankan KPID Jateng mengikuti aturan Perkominfo No. 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang tentang Penyiaran Tahun 2002. Kegiatan yang dilakukan juga tetap berdasarkan kebutuhan

masyarakat sehingga program, kebutuhan masyarakat dan regulasi harus ketiganya ini sinergi.

Dalam mensinergikan ketiga hal itu, ada permasalahan yang ditemukan di lapangan. Permasalahan tersebut adalah regulasi yang belum disesuaikan dengan perkembangan zaman atau dengan kata lain belum diperbarui lagi isinya. Terkait dengan “hoax” yang beredar di media sosial, sering kali masyarakat melaporkan hal tersebut kepada KPID Jateng. Padahal, jelas bahwa KPID Jateng memberikan pengawasan siaran hanya pada siaran yang memiliki frekuensi legal dan formal.

E. Akuntabilitas

Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh KPID Jateng disajikan dalam bentuk laporan seperti laporan rutin penggunaan dana hibah, laporan hasil kegiatan pleno, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Untuk transparansi sudah dipublikasikan melalui media website resmi KPID Jateng. Di website sudah ditampilkan semua program yang dijalankan. Selain itu, struktur organisasi, form pengaduan, alur proses perizinan juga sudah ditampilkan di website.

Faktor Penghambat Kinerja KPID Jateng

A. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia KPID Jateng belum sepenuhnya optimal. Dalam tugas mengawasi penyiaran, KPID Jateng memiliki sumber daya tenaga pemantau yang berjumlah 12 di kantor dan kelompok pemantau yang berjumlah 35 kelompok di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk tenaga pemantau di kantor, mereka diberikan tanggungjawab memantau empat siaran baik televisi maupun radio untuk tiap orang. Tenaga pemantau tersebut bekerja secara langsung memantau siaran yang sedang ditayangkan dan diputar. Mereka bekerja sesuai hari kerja mulai Senin sampai dengan Jum'at. Untuk sisanya, mereka merekam siaran yang terjadi pada hari weekend dan kemudian ketika hari weekday mereka saksikan dan dengarkan ulang siaran tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh kuantitas SDM, dimana ketersediaan yang ada dirasa memang kurang.

B. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana KPID Jateng dirasa kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan ketersediaan kendaraan dinas yang hanya diberikan tiga untuk kegiatan diluar. Hal semacam ini dirasa juga menghambat kinerja KPID Jateng. Dengan waktu yang telah ditargetkan untuk melaksanakan pekerjaan itu akan terhambat misal seharusnya bisa selesai di hari itu, jadi ada penundaan karena masalah kondisi mobil yang memang terbatas untuk kegiatan di luar. Upaya yang dilakukan dengan kendaraan dinas

yang terbatas ini ialah menggunakan mobil pribadi untuk pekerjaan yang memang benar-benar penting dan mendesak. Selain kurang, beberapa sarana yang disediakan juga ada yang rusak, seperti televisi yang tidak bisa digunakan untuk alat pantau. Televisi yang disediakan di kantor KPID Jateng berjumlah 20, tetapi yang bisa dioperasikan tidak semuanya melainkan berjumlah 16 sementara sisanya rusak atau belum diperbaiki.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja organisasi KPID Jateng belum optimal, terbukti dari aspek produktivitas, tanggungjawab, responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Pada aspek produktivitas, target KPID Jateng belum sesuai dengan realisasi di lapangan. Dalam pengawasan siaran, KPID Jateng menargetkan jumlah pelanggaran yang diberikan berkurang. Realita yang terjadi di lapangan ternyata jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi tiap tahunnya yang kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Pada aspek tanggungjawab, realisasi program dan kegiatan yang KPID Jateng lakukan juga belum tepat waktu sesuai regulasi. Hal tersebut dibuktikan dengan perizinan radio Konata yang membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk bisa dilakukan EDP. Aspek yang bermasalah lainnya adalah responsivitas. Responsivitas yang diberikan KPID Jateng dalam pengawasan belum optimal. Hal ini karena masih ada respon atau keluhan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan.

Masyarakat melihat bahwa KPID Jateng dalam melakukan pengawasan siaran lebih sering kepada lagu-lagu khusus untuk radio. Padahal, radio tidak hanya lagu saja yang ditampilkan tetapi ada konten lain yang seharusnya diperhatikan juga. Selain itu, perizinan juga memiliki keluhan. Hal ini terkait persyaratan perizinan yang rumit, berupa studi kelayakan yang tidak mudah untuk menyusunnya. Pada aspek akuntabilitas, KPID Jateng belum sepenuhnya akuntabel karena ada hal-hal yang belum disebarluaskan ke publik misal mengenai anggaran yang belum up to date serta kegiatan yang belum diperbarui di laman website. Untuk kualitas layanan yang diberikan KPID Jateng sudah berjalan dengan baik. Sejauh ini kualitas layanan sudah cukup prima, masyarakat yang menggunakan layanan KPID Jateng juga mengatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Faktor yang menghambat kinerja organisasi KPID Jateng dapat dilihat dari sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada hasil penelitian ini, kualitas sumber daya manusia KPID Jateng belum sepenuhnya optimal untuk bekerja. Karena dari ketersediaannya yang dirasa masih kurang untuk menjalankan program dan kegiatan. Untuk sarana prasarana yang membantu sumber daya manusia juga dirasa kurang karena keterbatasan sehingga untuk menunjang kebutuhan sumber daya manusia dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terhambat juga.

B. Saran

1. Dari kelima indikator pengukuran kinerja diatas, berikut saran yang dapat diberikan kepada KPID Jateng sebagai masukan untuk meningkatkan kinerjanya.
 - a) Untuk meningkatkan produktivitas, KPID Jateng perlu meningkatkan capaian program dan kegiatan yang belum sesuai dengan target. Peningkatan capaian program dan kegiatan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada kegiatan yang belum tercapai.
 - b) Untuk meningkatkan kualitas layanan, KPID Jateng perlu mempertahankan layanan yang sudah diberikan sejauh ini agar masyarakat tetap puas terhadap pelayanan perizinan KPID Jateng.
 - c) Untuk meningkatkan responsivitas, kinerja KPID Jateng dalam pengawasan perlu dioptimalkan lagi karena saat ini siaran radio dan televisi sudah sangat banyak sehingga cara kerja KPID harus lebih intensif lagi, agar siaran yang didengar dan disaksikan atau dicermati kesesuaian dengan aturan P3SPS. Dengan hal ini, KPID Jateng harus tegas kepada lembaga penyiar sehingga mereka mematuhi aturan-aturan KPID.
 - d) Untuk meningkatkan responsibilitas, waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kegiatan perizinan perlu dipatuhi oleh KPID Jateng apabila ingin memperbaiki kinerjanya. Ketepatan waktu yang diberikan menjadi penting karena akan mempengaruhi

- kepuasaan masyarakat terhadap waktu yang bisa diselesaikan untuk proses perizinan.
- e) Untuk meningkatkan akuntabilitas, KPID Jateng perlu memperbarui setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di website karena hal ini menjadi wujud keterbukaan mengenai kinerja.
2. Faktor penghambat KPID Jateng terbukti dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana. Maka dari itu, berikut saran yang dapat diberikan kepada KPID Jateng untuk meningkatkan kinerjanya.
- a) Dengan keterbatasan sdm yang ada, KPID Jateng perlu menjalin kerjasama dengan lembaga publik lain untuk sama-sama membantu dalam hal pengawasan penyiaran sehingga peneliti harap bisa membantu untuk mengoptimalkan kinerja KPID Jateng.
- b) Dengan kondisi sarana prasarana yang terbatas, KPID Jateng perlu menambahkan alat pantau di kabupaten/kota dan pengadaan sarana akses langsung hasil rekaman alat pantau melalui jaringan internet yang memudahkan KPID Jateng untuk bisa melihat laporan hasil rekaman itu, tanpa harus menunggu laporan dari kelompok pemantau yang tersebar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, Agus. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.

- Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media.
- Malayu, Hasibuan. 2007. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokusmedia
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Tentara Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Peraturan

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers
- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Jurnal Ilmiah

- Darmanto. 2012. *Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode I dan II*. Electronic Thesis Dissertations Gajah Mada University
- Dewantoro, Muhammad Rio dan Nina Widowati 2016. *Kinerja Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review
- Hidayat, Roby Arif. 2012. *Analisis Pelayanan Publik di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Kontrol Infotainment*. E-Journal Unesa
- Kurniati, Annisa Azwar dan Hartuti Purnaweni. 2015. *Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Studi Kasus di UPTD Kampong Wisata Taman Lele)*. Journal of Public Policy and Management Review
- Muthuveloo, Rajendran, Narendra Shanmugan dan Ai Ping Teoh. 2016. *The Impact of Tacit Knowledge Management on Organizational Performance*. Asia Pasific Management Review
- Parameswari, Palupi. et al. 2015. *Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review
- Rachmawati, Theodora Ratih dan Dyah Hariani 2016. *Analisis Kinerja Organisasi Di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang (Studi Kasus Pada Bidang Sosial Pelayanan Bantuan Dan Jaminan Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)*. Journal of Public Policy and Management Review

Sumber Lain

- Kpidjatengprov.go.id. (2017). *Teguran KPID Jateng*. Diakses melalui <https://kpid.jatengprov.go.id/teguran/> pada Senin, 15 Oktober 2017
- Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (Lakip) KPID Jateng Tahun 2015
- Rencana Strategis (Renstra) KPID Jateng Tahun 2013-2018
- Solopos.com (2016). *Begini Cara Menikmati Siaran Radio Anak Kota Solo*. Diakses melalui <http://www.solopos.com/2016/11/21/begini-cara-menikmati-siaran-radio-anak-kota-solo-770476> pada Selasa, 20 Oktober 2016
- Solopos.com (2016). *Kota Layak Anak Solo Radio Konata On Air 2 Jam Sehari*. Diakses Melalui <http://www.solopos.com/2016/03/08/kota-layak-anak-solo-radio-konata-on-air-2-jam-sehari-698947> pada Selasa, 20 Oktober 2016